

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
I	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Produktivitas BUMN di Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis				
1.1	Indikator 1.1 Realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Rp Triliun	Rp 9,96 T (TW2: Rp4,98 T)	Rp 4,26T**	85,54%
1.2	Indikator 1.2 Persentase Capaian Penyaluran KUR di Sektor Produksi	Persentase	54% (TW2: 54%)	64,44%	119,33%
1.3	Indikator 1.3 Persentase Debitur KUR Baru	Persentase	40% (TW2: 20%)	47,30%	120%
1.4	Indikator 1.4 Persentase Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas	Persentase	20% (TW2: 10%)	21,57%	120%
1.5	Indikator 1.5 Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Rp Triliun	Rp251,17 T (TW2: 125,58 T)	Rp149,38 T	118,95%
1.6	Indikator 1.6 Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Alsintan (KUA)	Rp Miliar	Rp93,24 M (TW2: 46,62 M)	Rp100,13 M	120%
1.7	Indikator 1.7 Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Industri Padat Karya (KIPK)	Rp Triliun	Rp17,58 M (TW2: Rp8,79M) Rp109,90 M* (TW2:Rp54,95 M)*	Rp99,32 M	120%
1.8	Indikator 1.8 Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP)	Rp Triliun	Rp11,24 T (Rp5,62T) Rp21,60 T* (TW2:Rp10,80 T)*	Rp20,34 T	120%
1.9	Indikator 1.9 Persentase Pelaksanaan Perlakuan Khusus KUR Pascabencana	Persentase	80% (TW2: 40%)	40%	120%

1.10	Indikator 1.10 Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah di BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Persentase	80% (TW2: 40%)	40%	100%
II	Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang berkualitas				
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait penyaluran KUR, KUA, KIPK, KPP, dan KUR Pascabencana	Persentase	80% (TW2: 40%)	40%	100%
2.1	Indikator 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion	Persentase	80% (TW2: 40%)	40%	100%
III	Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas				
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Indeks	3 dari 4 (TW2: 3 dari 4)	3,82	120%
IV	Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas				
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Persentase	92% (TW2: 40%)	40%	100%

*Target baru yang saat ini sedang proses pengajuan ke Biro MKKS

**Angka Proyeksi Realisasi Belanja Modal

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis ditunjukkan oleh pencapaian enam indikator kinerja, yaitu:

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**1.1 Realisasi
Jumlah Belanja
Modal BUMN
Bidang Jasa
Keuangan dan
Usaha Bisnis**

Latar Belakang

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia (UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)). BUMN memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, baik melalui kontribusi fiskal dalam bentuk pajak dan PNBK, penciptaan nilai ekonomi, maupun penguatan ekosistem usaha nasional. Dalam menjalankan usahanya, BUMN tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga mengemban fungsi pelayanan publik kepada masyarakat, penyediaan barang dan jasa untuk kepentingan umum, perintisan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta, serta pemberian bimbingan dan bantuan kepada pengusaha kecil melalui program kemitraan.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan peran strategisnya, BUMN juga didorong untuk merealisasikan investasi melalui belanja modal yang produktif, khususnya pada sektor industri jasa keuangan dan usaha bisnis. Belanja modal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional, mendorong substitusi impor, dan memperkuat ketahanan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah dalam negeri.

Pengembangan Usaha BUMN merupakan upaya pengelolaan BUMN melalui pengembangan dan diversifikasi usaha, restrukturisasi dan revitalisasi, peningkatan sinergi antar BUMN, guna meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN sehingga dapat memberikan kontribusi penerimaan negara.

Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan pertambahan pendapatan nasional agregatif atau pertumbuhan *output* dalam periode tertentu yang meningkat dari periode sebelumnya berdasarkan indikator seperti konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor bersih. Dalam hal ini, belanja modal BUMN di sektor Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis berperan sebagai pendorong investasi yang mendukung peningkatan kapasitas produksi, daya saing industri, dan transformasi ekonomi nasional.

BUMN bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang dikoordinasikan belanja modalnya yaitu pada BUMN yang memiliki kriteria diantaranya: merupakan BUMN dengan nilai aset besar dan kontribusi tinggi terhadap pendapatan negara, BUMN yang sudah tercatat di pasar modal (*go public*), atau BUMN sektor strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal, serta di bawah koordinasi Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis (BUMN Himbara) dengan target: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp3,0 Triliun, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp2,7 Triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp1,4 Triliun, PT Bank Tabungan Negara Tbk sebesar Rp1,6 Triliun, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebesar Rp1,2 Triliun, sehingga total target Capex 2026 sebesar Rp9,96 Triliun.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis sebesar Rp 4,26T dengan target Triwulan II 2026 Rp4,98 T, sehingga tercapai 42,77%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.1. Realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis.	Rp T	Rp9,96 T	Rp4,26T**	85,54%

**Angka Proyeksi Realisasi Belanja Modal

Realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis dengan target tahun 2026 sebesar Rp9,96 Triliun. Sampai dengan Triwulan II 2026 telah terealisasi sebesar Rp4,26 Triliun atau mencapai 85,54% dari target Triwulan II 2026 sebesar Rp4,98 T. Realisasi ini berdasarkan proyeksi Capex Triwulan II untuk BUMN Jasa Keuangan BRI, BNI, dan BTN dan email balasan dari Mandiri dan BSI atas surat dari Asdep Pengembangan BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis nomor B/AK.01/75/D.I.M.EKON.6/06/2026 perihal Permohonan Data Realisasi Belanja Modal Triwulan ii 2026.

Realisasi Triwulan II 2026 didorong oleh koordinasi yang efektif antar stakeholder tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada Triwulan II 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW II	Status	Realisasi
1	Monitoring, Realisasi Belanja Modal (Capex) Triwulan I bersama BUMN Himbara	Terlaksana	Telah diterima Surat dari Kemen BUMN Nomor S-6/DPN.BP/06/2026 Tanggal 19 Juni 2026 Hal Penyampaian Data Capex BUMN Untuk Target Tahun 2026 dan Realisasi Triwulan I Tahun 2026
2	Monitoring Realisasi Belanja Infrastruktur Layanan Keuangan	Terlaksana	Telah diterima Surat dari Kemen BUMN Nomor S-6/DPN.BP/06/2026 Tanggal 19 Juni 2026 Hal Penyampaian Data Capex BUMN Untuk Target Tahun

			2026 dan Realisasi Triwulan I Tahun 2026
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi secara efektif kepada BUMN terkait
2. Mengumpulkan data Capex Bank BUMN Himbara

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapat ketidaksesuaian antara jadwal pelaporan kinerja BUMN dengan kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan laporan kinerja ini, sehingga data dan informasi dari BUMN belum sepenuhnya tersedia karena masih dalam tahap konsolidasi;
2. Koordinasi antar kementerian dan lembaga masih kompleks

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan kedepannya:

1. Memperbarui data secara berkala guna mendukung pemantauan berkelanjutan atas pencapaian kinerja BUMN;
2. Meningkatkan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi

1.2 Persentase Capaian Penyaluran KUR di Sektor Produksi

Latar Belakang

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program Kredit Usaha Rakyat didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KUR. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KUR disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya. Penyaluran KUR di sektor produksi adalah porsi penyaluran KUR di sektor produksi dibandingkan dengan total penyaluran KUR selama 1 (satu) tahun.

Adapun target penyaluran KUR pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp251,17 triliun, dengan alokasi penyaluran ke sektor produksi sebesar 54%. Agar proporsi penyaluran KUR di sektor produksi tetap terjaga perlu adanya penetapan target penyaluran pada setiap triwulan sebesar 54%. Yang dimaksud dengan sektor produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa di luar

sektor perdagangan. Dengan demikian, capaian penyaluran KUR di sektor produksi mencerminkan akumulasi penyaluran KUR pada seluruh sektor kegiatan ekonomi selain sektor perdagangan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Capaian Penyaluran KUR di Sektor Produksi sebesar 61,49% dengan target Triwulan II 2026 sebesar 54%, sehingga tercapai 114,61%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.2 Persentase Capaian Penyaluran KUR di Sektor Produksi	Persentase	54%	64,44%	119,33%

Persentase Capaian Penyaluran KUR di Sektor Produksi dengan target tahun 2026 sebesar 54%. Sampai dengan Triwulan II 2026 telah terealisasi sebesar 64,44% atau mencapai 119,33% dari target Triwulan II 2026 sebesar 54%.

Realisasi Triwulan II 2026 didorong oleh koordinasi yang efektif antar *stakeholder* tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada Triwulan II 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW II 2026	Status	Realisasi
1	Melaksanakan sosialisasi Permenko tentang Pedoman Pelaksanaan KUR	Terlaksana	- Menjadi Narasumber atas undangan Asdep Pembiayaan, Kementerian UMKM, dalam tema “Sosialisasi Penyaluran KUR”, pada tanggal 28 April 2026 - Telah terlaksananya FGD terkait Permenko KUR nomor 1 dan 2 tahun 2026 pada tanggal 8 Mei 2026 - Telah terlaksananya Sosialisasi Penyaluran KUR 2026 BPD Jawa Tengah pada 10 April 2026
2	Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis dalam rangka penyusunan kebijakan KUR Semester II 2026	Terlaksana	Terlaksananya Rapat Internal Deputi 1 Pembahasan Rakor Growth dan KUR pada tanggal 11 Mei 2026

			• Terlaksananya Rapat Teknis Pembahasan Rakomjak dan Review Usulan PNM pada tanggal 29 Mei 2026
3	Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR Semester II tahun 2026	Terlaksana	• Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Tingkat Eselon I pada tanggal 12 Mei 2026 • Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Komite Kebijakan level Menteri, Rapat Koordinasi terkait Optimalisasi Kredit Program Semester I Tahun 2026, pada tanggal 22 Juni 2026 di Graha Sawala
4	Melaksanakan Diskusi Terfokus dalam rangka mengoptimalkan penyaluran KUR Tahun 2026	Terlaksana	• Menghadiri undangan dari Bank Indonesia dalam FGD dengan tema "Pendalaman Kebijakan KUR" pada tanggal 4 Mei 2026 • Telah terlaksananya Agenda Deputi: Pertemuan dengan Deputi Akuntan Negara BPKP Membahas Laporan KUR dari BPKP pada tanggal 14 April 2026
5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan Penjaminan KUR Semester I 2026 termasuk didalamnya memuat pelaksanaan Permenko tentang pedoman pelaksanaan KUR	Terlaksana	• Telah terlaksananya FGD terkait Permenko KUR nomor 1 dan 2 tahun 2026 pada tanggal 8 Mei 2026 • Telah terlaksananya Rapat Rekonsiliasi data Penjaminan KUR Askrindo pada 21 Mei 2026 • Telah terlaksananya Rapat Rekonsiliasi data Penjaminan KUR Jamkrindo pada 22 Mei 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang efektif dengan K/L terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUR Tahun 2026
2. Komunikasi yang efektif dan terfokus kepada Penyalur dan Penjamin KUR terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUR Tahun 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang perlu ditingkatkan Kembali antar K/L
2. Komunikasi yang efektif yang perlu ditingkatkan kembali antar stakeholder KUR

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan kedepannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis
2. Memperkuat komunikasi yang efektif

1.3 Persentase Debitur KUR Baru

Latar Belakang

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program Kredit Usaha Rakyat didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KUR.

Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KUR disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya. Debitur KUR Baru adalah debitur yang baru pertama kali memperoleh pembiayaan KUR. Persentase debitur baru adalah porsi jumlah debitur baru dibandingkan dengan total debitur KUR selama 1 (satu) tahun.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Debitur KUR Baru sebesar 47,30% dengan target Triwulan II 2026 sebesar 20%, sehingga tercapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.3 Persentase Debitur KUR Baru	Persentase	20%	47,30%	120%

Total debitur KUR s.d. 30 Juni 2026 sebanyak 2,35 juta debitur. Persentase Debitur KUR Baru dengan target tahun 2026 sebesar 40%. Sampai dengan Triwulan II 2026 telah terealisasi sebesar 47,30% atau mencapai 20 % dari target Triwulan II 2026 sebesar 20%.

Realisasi Triwulan II 2026 didorong oleh koordinasi yang efektif antar stakeholder tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada Triwulan II 2026

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW II 2026	Status	Realisasi
1	Melaksanakan sosialisasi Permenko tentang Pedoman Pelaksanaan KUR	Terlaksana	• Menjadi Narasumber atas undangan Asdep Pembiayaan, Kementerian UMKM, dalam tema “Sosialisasi Penyaluran KUR”, pada tanggal 28 April 2026 • Telah terlaksananya FGD terkait Permenko KUR nomor 1 dan 2 tahun 2026 pada tanggal 8 Mei 2026 • Telah terlaksananya Sosialisasi Penyaluran KUR 2026 BPD Jawa Tengah pada 10 April 2026
2	Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis dalam rangka penyusunan kebijakan KUR Semester II 2026	Terlaksana	• Terlaksananya Rapat Internal Deputi 1 Pembahasan Rakor Growth dan KUR pada tanggal 11 Mei 2026 • Terlaksananya Rapat Teknis Pembahasan Rakomjak dan Review Usulan PNM pada tanggal 29 Mei 2026
3	Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR Semester II tahun 2026	Terlaksana	• Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Tingkat Eselon I pada tanggal 12 Mei 2026 • Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Komite Kebijakan level Menteri, Rapat Koordinasi terkait Optimalisasi Kredit Program Semester I Tahun 2026, pada tanggal 22 Juni 2026 di Graha Sawala
4	Melaksanakan Diskusi Terfokus dalam rangka mengoptimalkan penyaluran KUR Tahun 2026	Terlaksana	• Menghadiri undangan dari Bank Indonesia dalam FGD dengan tema “Pendalaman Kebijakan KUR” pada tanggal 4 Mei 2026

			• Telah terlaksanya Agenda Deputi: Pertemuan dengan Deputi Akuntan Negara BPKP Membahas Laporan KUR dari BPKP pada tanggal 14 April 2026
5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan Penjaminan KUR Semester I 2026 termasuk didalamnya memuat pelaksanaan Permenko tentang pedoman pelaksanaan KUR	Terlaksana	• Telah terlaksananya FGD terkait Permenko KUR nomor 1 dan 2 tahun 2026 pada tanggal 8 Mei 2026 • Telah terlaksananya Rapat Rekonsiliasi data Penjaminan KUR Askrido pada 21 Mei 2026 • Telah terlaksananya Rapat Rekonsiliasi data Penjaminan KUR Jamkrindo pada 22 Mei 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang efektif dengan K/L terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUR Tahun 2026
2. Komunikasi yang efektif dan terfokus kepada Penyalur dan Penjamin KUR terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUR Tahun 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang perlu ditingkatkan Kembali antar K/L
2. Komunikasi yang efektif yang perlu ditingkatkan kembali antar stakeholder KUR

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan kedepannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis
2. Memperkuat komunikasi yang efektif

1.4 Persentase Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas

Latar Belakang

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program Kredit Usaha Rakyat didukung BUMN

perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KUR.

Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KUR disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya. Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas adalah debitur yang mengakses kembali KUR dengan nominal pinjaman yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya, baik dalam satu skema maupun antarskema; dan Eks Debitur KUR yang mengakses kredit komersial. Persentase debitur graduasi/naik kelas adalah porsi jumlah debitur graduasi dibandingkan dengan total debitur KUR selama 1 (satu) tahun.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas sebesar 21,57% dengan target Triwulan II 2026 sebesar 10%, sehingga tercapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.4 Persentase Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas	Persentase	10%	21,57%	120%

Berdasarkan data yang diambil dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada tanggal 30 Juni 2026, didapatkan hal sebagai berikut:

Total debitur KUR s.d. 30 Juni 2026 sebanyak 2,35 juta debitur. Persentase Debitur KUR Graduasi/naik kelas dengan target tahun 2026 sebesar 20%. Sampai dengan Triwulan II 2026 telah terealisasi sebesar 21,57% atau mencapai 120% dari target Triwulan II 2026 sebesar 10%.

Realisasi Triwulan II 2026 didorong oleh koordinasi yang efektif antar *stakeholder* tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada Triwulan II 2026

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW II 2026	Status	Realisasi
1	Melaksanakan sosialisasi Permenko tentang Pedoman Pelaksanaan KUR	Terlaksana	- Menjadi Narasumber atas undangan Asdep Pembiayaan, Kementerian UMKM, dalam tema “Sosialisasi Penyaluran KUR”, pada tanggal 28 April 2026 - Telah terlaksananya FGD terkait Permenko KUR nomor 1 dan 2

			tahun 2026 pada tanggal 8 Mei 2026 • Telah terlaksananya Sosialisasi Penyaluran KUR 2026 BPD Jawa Tengah pada 10 April 2026
2	Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis dalam rangka penyusunan kebijakan KUR Semester II tahun 2026	Terlaksana	• Terlaksananya Rapat Internal Deputi 1 Pembahasan Rakor Growth dan KUR pada tanggal 11 Mei 2026 • Terlaksananya Rapat Teknis Pembahasan Rakomjak dan Review Usulan PNM pada tanggal 29 Mei 2026
3	Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR Semester II tahun 2026	Terlaksana	• Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Tingkat Eselon I pada tanggal 12 Mei 2026 • Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Komite Kebijakan level Menteri, Rapat Koordinasi terkait Optimalisasi Kredit Program Semester I Tahun 2026, pada tanggal 22 Juni 2026 di Graha Sawala
4	Melaksanakan Diskusi Terfokus dalam rangka mengoptimalkan penyaluran KUR Tahun 2026	Terlaksana	• Menghadiri undangan dari Bank Indonesia dalam FGD dengan tema “Pendalaman Kebijakan KUR” pada tanggal 4 Mei 2026 • Telah terlaksananya Agenda Deputi: Pertemuan dengan Deputi Akuntan Negara BPKP Membahas Laporan KUR dari BPKP pada tanggal 14 April 2026
5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan Penjaminan KUR Semester I 2026 termasuk didalamnya memuat pelaksanaan Permenko tentang pedoman pelaksanaan KUR	Terlaksana	• Telah terlaksananya FGD terkait Permenko KUR nomor 1 dan 2 tahun 2026 pada tanggal 8 Mei 2026 • Telah terlaksananya Rapat Rekonsiliasi data Penjaminan KUR Askrindo pada 21 Mei 2026 • Telah terlaksananya Rapat Rekonsiliasi data Penjaminan

			KUR Jamkrindo pada 22 Mei 2026
--	--	--	--------------------------------

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang efektif dengan K/L terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUR Tahun 2026
2. Komunikasi yang efektif dan terfokus kepada Penyalur dan Penjamin KUR terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUR Tahun 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang perlu ditingkatkan Kembali antar K/L
2. Komunikasi yang efektif yang perlu ditingkatkan kembali antar *stakeholder* KUR

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan kedepannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis
2. Memperkuat komunikasi yang efektif

1.5
Jumlah
Realisasi
Penyaluran
Kredit Usaha
Rakyat (KUR)

Latar Belakang

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program Kredit Usaha Rakyat didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KUR.

Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KUR disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya. Debitur KUR Baru adalah debitur yang baru pertama kali memperoleh pembiayaan KUR. Persentase debitur baru adalah porsi jumlah debitur baru dibandingkan dengan total debitur KUR selama 1 (satu) tahun.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Jumlah realisasi Penyaluran KUR sebesar Rp149,38 Triliun dengan target Triwulan II 2026 sebesar Rp125,58 Triliun, sehingga tercapai 118,95%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.5 Jumlah Realisasi Penyaluran KUR	Rp T	Rp125,58 T	Rp149,38 T	118,95%

Berdasarkan data yang diambil dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada tanggal 30 Juni 2026, didapatkan hal sebagai berikut:

Realisasi KUR Januari 2026 s.d. 30 Juni 2026 sebesar Rp149,38 triliun dan diberikan kepada 2,35 juta debitur.

Realisasi Triwulan II 2026 didorong oleh koordinasi yang efektif antar stakeholder tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada Triwulan II 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW II 2026	Status	Realisasi
1	Melaksanakan sosialisasi Permenko tentang Pedoman Pelaksanaan KUR	Terlaksana	• Menjadi Narasumber atas undangan Asdep Pembiayaan, Kementerian UMKM, dalam tema “Sosialisasi Penyaluran KUR”, pada tanggal 28 April 2026 • Telah terlaksananya FGD terkait Permenko KUR nomor 1 dan 2 tahun 2026 pada tanggal 8 Mei 2026 • Telah terlaksananya Sosialisasi Penyaluran KUR 2026 BPD Jawa Tengah pada 10 April 2026
2	Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis dalam rangka penyusunan kebijakan KUR Semester II 2026	Terlaksana	• Terlaksananya Rapat Internal Deputi 1 Pembahasan Rakor Growth dan KUR pada tanggal 11 Mei 2026 • Terlaksananya Rapat Teknis Pembahasan Rakomjak dan Review Usulan PNM pada tanggal 29 Mei 2026

3	Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR Semester II tahun 2026	Terlaksana	• Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Tingkat Eselon I pada tanggal 12 Mei 2026 • Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Komite Kebijakan level Menteri, Rapat Koordinasi terkait Optimalisasi Kredit Program Semester I Tahun 2026, pada tanggal 22 Juni 2026 di Graha Sawala
4	Melaksanakan Diskusi Terfokus dalam rangka mengoptimalkan penyaluran KUR Tahun 2026	Terlaksana	• Menghadiri undangan dari Bank Indonesia dalam FGD dengan tema “Pendalaman Kebijakan KUR” pada tanggal 4 Mei 2026 • Telah terlaksananya Agenda Deputi: Pertemuan dengan Deputi Akuntan Negara BPKP Membahas Laporan KUR dari BPKP pada tanggal 14 April 2026
5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan Penjaminan KUR Semester I 2026 termasuk didalamnya memuat pelaksanaan Permenko tentang pedoman pelaksanaan KUR	Terlaksana	• Telah terlaksananya FGD terkait Permenko KUR nomor 1 dan 2 tahun 2026 pada tanggal 8 Mei 2026 • Telah terlaksananya Rapat Rekonsiliasi data Penjaminan KUR Askrindo pada 21 Mei 2026 • Telah terlaksananya Rapat Rekonsiliasi data Penjaminan KUR Jamkrindo pada 22 Mei 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang efektif dengan K/L terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUR Tahun 2026
2. Komunikasi yang efektif dan terfokus kepada Penyalur dan Penjamin KUR terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUR Tahun 2026

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang perlu ditingkatkan Kembali antar K/L
2. Komunikasi yang efektif yang perlu ditingkatkan kembali antar stakeholder KUR

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan kedepannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis
2. Memperkuat komunikasi yang efektif

1.6
Jumlah
Realisasi
Penyaluran
Kredit Usaha
Alsintan (KUA)

Latar Belakang

Kredit Usaha Alsintan (KUA) adalah kredit/pembiayaan investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif, layak, dan bergerak di sektor Pertanian untuk pembelian Alat dan Mesin Pertanian yang diusahakan sebagai Alat dan Mesin Pertanian yang memperoleh subsidi bunga dari pemerintah.

Program Kredit Usaha Alsintan didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KUA. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUA, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KUA disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya. Jumlah realisasi penyaluran KUA adalah plafon KUA yang disalurkan oleh Penyalur KUA yaitu bank dan nonbank selama 1 (satu) tahun.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II 2026, jumlah realisasi Penyaluran KUA sebesar Rp100,13 Miliar dengan target Triwulan II 2026 sebesar Rp46,62 Miliar, sehingga tercapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.6 Jumlah Realisasi Penyaluran KUA	Rp M	Rp46,62 M	Rp100,13 M	120%

Berdasarkan data yang diambil dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada tanggal 30 Juni 2026, didapatkan hal sebagai berikut:

Realisasi KUA Januari 2026 s.d. 30 Juni 2026 sebesar Rp100,13 Miliar dan diberikan kepada 141 debitur.

Realisasi Triwulan II 2026 didorong oleh koordinasi yang efektif antar stakeholder tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada Triwulan II 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW II	Status	Realisasi
----	--------------------	--------	-----------

1	Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUA Semester II tahun 2026	Terlaksana	• Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Tingkat Eselon I pada tanggal 12 Mei 2026 • Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Komite Kebijakan level Menteri, Rapat Koordinasi terkait Optimalisasi Kredit Program Semester I Tahun 2026, pada tanggal 22 Juni 2026 di Graha Sawala
2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUA Semester I 2026	Terlaksana	• Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Kendala Penyaluran Kredit Usaha Alsintan (KUA) Subsektor Peternakan pada tanggal 19 Mei 2026, atas undangan dari Undangan Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan, Kementan

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang efektif dengan K/L terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUA Tahun 2026
2. Komunikasi yang efektif dan terfokus kepada Penyalur dan Penjamin KUA terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUR Tahun 2026

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang perlu ditingkatkan Kembali antar K/L
2. Komunikasi yang efektif yang perlu ditingkatkan kembali antar stakeholder KUR

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan kedepannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis
2. Memperkuat komunikasi yang efektif

1.7.
Jumlah
Realisasi
Penyaluran
Kredit Industri
Padat Karya
(KIPK)

Latar Belakang

Kredit Industri Padat Karya (KIPK) adalah kredit/pembiayaan investasi atau kredit/pembiayaan investasi yang dikombinasikan dengan kredit/pembiayaan modal kerja kepada debitur individu/perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha produktif di sektor industri padat karya tertentu.

Program KIPK didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KIPK. Dari sisi

lembaga keuangan penyalur KIPK, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KIPK disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya. Jumlah realisasi penyaluran KIPK adalah plafon KIPK yang disalurkan oleh Penyalur KIPK yaitu bank dan non-bank selama 1 (satu) tahun.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II Tahun 2026, jumlah realisasi Penyaluran KIPK sebesar Rp99,32 Miliar dengan target Triwulan II 2026 sebesar Rp54,95 Miliar, sehingga tercapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.7 Jumlah Realisasi Penyaluran KIPK	Rp M	Rp8,79 M Rp54,95 M*	Rp99,32 M	120%

*Target baru yang sedang proses pengajuan ke Biro MKKS

Berdasarkan data yang diambil dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada tanggal 30 Juni 2026, didapatkan hal sebagai berikut:

Realisasi KIPK Januari 2026 s.d. 30 Juni 2026 sebesar Rp99,32 Miliar dan diberikan kepada 43 debitur.

Realisasi KIPK Triwulan II 2026 didorong oleh koordinasi yang efektif antar stakeholder tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada Triwulan II 2026

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW II	Status	Realisasi
1	Sosialisasi Permenko terkait Pedoman Pelaksanaan KIPK	Terlaksana	Telah terlaksananya Sosialisasi kebijakan kredit program pada tanggal 8 Mei 2026
2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIPK Triwulan I 2026	Terlaksana	- Telah terlaksananya Rapat Tindak Lanjut Usulan Optimalisasi KIPK Pada 1 April 2026 - Telah Terlaksananya Rapat Persiapan Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Program KIPK Semester I Tahun 2026 dan Pembahasan Pemanfaatan Fitur pada Sistem

			Informasi Kredit Program (SIKP) KIPK pada tanggal 18 Juni 2026
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang efektif dengan K/L terkait dengan optimalisasi Penyaluran KIPK Tahun 2026
2. Komunikasi yang efektif dan terfokus kepada Penyalur dan Penjamin KIPK terkait dengan optimalisasi Penyaluran KIPK Tahun 2026

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang perlu ditingkatkan Kembali antar K/L
2. Komunikasi yang efektif yang perlu ditingkatkan kembali antar stakeholder KIPK

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan kedepannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis
2. Memperkuat komunikasi yang efektif

1.8.

Jumlah
Realisasi
Penyaluran
Kredit Program
Perumahan
(KPP)

Latar Belakang

Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung penyediaan dan kepemilikan rumah bagi UMKM yang digunakan untuk mendukung aktivitas usaha UMKM, serta mendorong pertumbuhan sektor perumahan yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian, termasuk penyerapan tenaga kerja dan penguatan industri pendukung.

Dalam pelaksanaannya, KPP didukung oleh lembaga keuangan, termasuk BUMN perbankan sebagai penyalur utama, serta dapat melibatkan lembaga keuangan lainnya sesuai ketentuan program. Realisasi penyaluran KPP mencerminkan seberapa optimal program pembiayaan perumahan dijalankan, baik dari sisi ketersediaan akses pembiayaan maupun efektivitas dukungan ekosistem pembiayaan perumahan.

Jumlah realisasi penyaluran KPP dihitung sebagai total penyaluran pembiayaan KPP yang telah dicairkan kepada debitur oleh seluruh penyalur (bank dan/atau non-bank) selama 1 (satu) tahun, sesuai dengan data pelaporan resmi program.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II Tahun 2026, jumlah realisasi Penyaluran KPP sebesar Rp20,34 Triliun dengan target Triwulan II 2026 sebesar Rp10,80 Triliun, sehingga tercapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
-------------------------	--------	--------	-----------	-----------

1.8 Jumlah Realisasi Penyaluran KPP	Rp T	Rp5,62T Rp10,80 T*	Rp20,34 T	120%
-------------------------------------	------	-----------------------	-----------	------

*Target baru yang sedang proses pengajuan ke Biro MKKS

Berdasarkan data yang diambil dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada tanggal 30 Juni 2026, didapatkan hal sebagai berikut:

Realisasi KPP Januari 2026 s.d. 30 Juni 2026 sebesar Rp10,80 triliun dan diberikan kepada 95.560 debitur.

Realisasi Triwulan II 2026 didorong oleh koordinasi yang efektif antar stakeholder tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada Triwulan II 2026

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW II	Status	Realisasi
1	Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KPP Semester II tahun 2026;	Terlaksana	• Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Tingkat Eselon I pada tanggal 12 Mei 2026 • Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Komite Kebijakan level Menteri, Rapat Koordinasi terkait Optimalisasi Kredit Program Semester I Tahun 2026, pada tanggal 22 Juni 2026 di Graha Sawala
2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KPP Semester I 2026.	Terlaksana	• Telah terlaksana FGD Kajian Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kredit Program Perumahan (KPP) pada 11 Juni 2026 atas Undangan Direktur Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kemenkeu • Telah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kredit Program Perumahan BRI di Bandung pada 25 Juni 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang efektif dengan K/L terkait dengan optimalisasi Penyaluran KPP Tahun 2026
2. Komunikasi yang efektif dan terfokus kepada Penyalur dan Penjamin KPP terkait dengan optimalisasi Penyaluran KPP Tahun 2026

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang perlu ditingkatkan Kembali antar K/L
2. Komunikasi yang efektif yang perlu ditingkatkan kembali antar stakeholder KPP

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan kedepannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis
2. Memperkuat komunikasi yang efektif

1.9

Persentase Pelaksanaan Perlakuan Khusus KUR Pascabencana

Latar Belakang

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program Kredit Usaha Rakyat didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KUR. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KUR disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya.

Presentase pelaksanaan Perlakuan Khusus KUR Pascabencana adalah ukuran keberhasilan pelaksanaan perlakuan khusus kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pascabencana di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dinilai berdasarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana dari sisi substansi kebijakan. Penilaian efektivitas dilakukan terhadap pelaksanaan KUR Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana yang dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Perlakuan khusus	Realisasi
1	Grace Period	Pemberian masa tenggang kepada debitur KUR di wilayah terdampak bencana, di mana kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga/margin tidak dibayarkan selama masa tenggang tanpa dikenakan sanksi.
2	Restrukturisasi	Penataan ulang struktur kredit KUR agar debitur KUR di wilayah terdampak bencana dapat melanjutkan kewajibannya tanpa harus mengalami gagal bayar, melalui perpanjangan jangka waktu dan/atau suplesi

3	Percepatan Pemulihan	Penyaluran KUR baru di wilayah terdampak bencana dengan relaksasi kemudahan administratif dan suku bunga yang ditanggung debitur di wilayah terdampak bencana sebesar 0% di tahun 2026
---	----------------------	--

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Perlakuan Khusus KUR Pascabencana sebesar 20% dengan target Triwulan II 2026 sebesar 40%, sehingga tercapai 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.9. Persentase Pelaksanaan Perlakuan Khusus KUR Pascabencana	Persentase	40%	40%	100%

Persentase Persentase Pelaksanaan Perlakuan Khusus KUR Pascabencana dengan target tahun 2026 sebesar 80%. Sampai dengan Triwulan II 2026 telah terealisasi sebesar 40% atau mencapai 100% dari target Triwulan II 2026 sebesar 40%. Pencapaian ini didasarkan atas realisasi rencana aksi yang telah dilaksanakan pada Triwulan II 2026.

Realisasi Triwulan II 2026 didorong oleh koordinasi yang efektif antar stakeholder tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada Triwulan II 2026

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW II	Status	Realisasi
1	Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR Pascabencana Semester II tahun 2026	Terlaksana	- Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Tingkat Eselon I pada tanggal 12 Mei 2026 - Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Komite Kebijakan level Menteri, Rapat Koordinasi terkait Optimalisasi Kredit Program Semester I Tahun 2026, pada tanggal 22 Juni 2026 di Graha Sawala

2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan Penjaminan KUR pascabencana semester 1 2026	Terlaksana	Telah melakukan Kunjungan Lapangan Pemantauan Rencana Pemulihan Pascabencana di Aceh pada 5-8 mei 2026
---	--	------------	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang efektif dan terfokus kepada Penyalur KUR Pascabencana terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUR Pascabencana Tahun 2026.
2. Komunikasi yang efektif dan terfokus kepada Penyalur dan Penjamin KUR Pascabencana terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUR Pascabencana Tahun 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang perlu ditingkatkan kembali antar K/L
2. Komunikasi yang efektif yang perlu ditingkatkan kembali antar stakeholder KUR

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan kedepannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis
2. Memperkuat komunikasi yang efektif

1.10

Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah di BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis

Latar Belakang

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disebutkan mengacu pada persentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis. Penugasan pemerintah kepada BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang dikoordinasikan diantaranya mencakup:

1. Pelaksanaan penugasan kepada Bank Himbara dalam rangka penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian, Penyaluran Kredit Industri Padat Karya, dan Penyaluran Kredit Program Perumahan.
2. Pelaksanaan penugasan kepada BUMN jasa keuangan yang berada di dalam Ekosistem Bullion dalam rangka penguatan ekosistem bullion di Indonesia

IKU ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan peran BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis untuk memperkuat akses permodalan, memperdalam pasar keuangan dan mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional, untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah di BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis sebesar 40% dengan target Triwulan II 2026 sebesar 40%, sehingga tercapai 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.10. Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah di BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Persentase	40%	40%	100%

Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah di BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis dengan target tahun 2026 sebesar 80%. Sampai dengan Triwulan II 2026 telah terealisasi sebesar 40% atau mencapai 100% dari target Triwulan II 2026 sebesar 40%. Pencapaian ini didasarkan atas realisasi rencana aksi yang telah dilaksanakan pada Triwulan II 2026.

Realisasi Triwulan II 2026 didorong oleh koordinasi yang efektif antar stakeholder tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada Triwulan II 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW II	Status	Realisasi
1	Koordinasi dengan Bank Himbara terkait dengan penugasan pemerintah untuk penyaluran Kredit Alsintan, KIPK, dan KPP	Terlaksana	- Telah terlaksanya Agenda Deputi Pertemuan dengan Perwakilan BRI PNM dan BP BUMN pada 20 Mei 2026 - Telah terlaksana Rapat Teknis Pembahasan Suku Bunga PNM Mekaar pada 17 Juni 2026
2	Monitoring dan Evaluasi terhadap Bank Himbara dalam menyalurkan Kredit Alsintan, KIPK, dan KPP	Terlaksana	Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Kendala Penyaluran Kredit Usaha Alsintan (KUA) Subsektor Peternakan pada tanggal 19 Mei 2026, atas undangan dari Undangan

			Direktur Hilirasasi Hasil Peternakan, Kementan • Telah Terlaksananya Rapat Persiapan Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Program KIPK Semester I Tahun 2026 dan Pembahasan Pemanfaatan Fitur pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) KIPK pada tanggal 18 Juni 2026 • Telah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kredit Program Perumahan BRI di Bandung pada 25 Juni 2026
3	Monitoring dan Evaluasi terhadap BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis dalam mengembangkan ekosistem Bullion	Terlaksana	Telah terlaksana Rapat Harga Acuan Emas dan IBMA dengan PT Pegadaian dan PT BSI pada 19 Mei 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang efektif dan terfokus kepada Penyalur KUA, KIPK, dan KPP terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUA, KIPK, dan KPP Tahun 2026
2. Koordinasi yang efektif dan terfokus kepada Penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion Tahun 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang perlu ditingkatkan Kembali antar K/L
2. Komunikasi yang efektif yang perlu ditingkatkan kembali antar stakeholder KUR
3. Kurangnya koordinasi yang efektif terkait dengan persiapan launching kegiatan usaha bulion
4. Kurangnya komunikasi aktif terkait dengan progres monitoring kegiatan usaha bulion kepada PT Pegadaian dan Bank BSI

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan kedepannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis

2. Memperkuat komunikasi yang efektif
3. Koordinasi yang efektif dengan K/L terkait untuk pengembangan ekosistem kegiatan usaha bulion
4. Komunikasi yang aktif dengan BUMN penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion

2

Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase

**Efektivitas
Sinkronisasi,
Koordinasi, dan
Pengendalian
kebijakan terkait
penyaluran KUR,
KUA, KIPK, KPP,
dan KUR
Pascabencana**

Latar Belakang

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA), dan Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), dan KUR Pascabencana.

Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait penyaluran KUR, KUA, KIPK, KPP, dan KUR Pascabencana sebesar 40% dengan target Triwulan II 2026 sebesar 40%, sehingga tercapai 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait penyaluran KUR, KUA, KIPK, KPP, dan KUR Pascabencana	Persentase	40%	40%	100%

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait penyaluran KUR, KUA, KIPK, KPP, dan KUR Pascabencana dengan target tahun 2026 sebesar 80%. Sampai dengan Triwulan II 2026 telah terealisasi sebesar 40% atau mencapai 100% dari target Triwulan II 2026 sebesar 40%. Hal ini berdasarkan realisasi Rencana Aksi yang telah dilaksanakan pada Triwulan II 2026.

Realisasi Triwulan II 2026 didorong oleh koordinasi yang efektif antar stakeholder tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada Triwulan II 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW II 2026	Status	Realisasi
1	Penyusunan Alternatif Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis terkait dengan pelaksanaan KUR, KUA, KIPK, KPP dan KUR Pascabencana	Terlaksana	Telah terlaksana Rapat Harga Acuan Emas dan IBMA dengan PT Pegadaian dan PT BSI pada 19 Mei 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang efektif dengan K/L terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUR Pascabencana Tahun 2026
2. Komunikasi yang efektif dan terfokus kepada Penyalur dan Penjamin KUR terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUR Pascabencana Tahun 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang perlu ditingkatkan Kembali antar K/L

2. Komunikasi yang efektif yang perlu ditingkatkan kembali antar stakeholder

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan kedepannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis
2. Memperkuat komunikasi yang efektif

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion

Latar Belakang

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion.

Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait pengembangan ekosistem kegiatan usaha bulion sebesar 40% dengan target Triwulan II 2026 sebesar 40%, sehingga tercapai 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion	Persentase	40%	40%	100%

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait pengembangan ekosistem kegiatan usaha bulion dengan target Tahun 2026 sebesar 80%. Sampai dengan Triwulan II 2026 telah terealisasi sebesar 40% atau mencapai 100% dari target Triwulan II 2026 sebesar 40%. Pencapaian ini didasarkan atas realisasi rencana aksi yang telah dilaksanakan pada Triwulan II 2026.

Realisasi Triwulan II 2026 didorong oleh koordinasi yang efektif antar stakeholder tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada Triwulan II 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW II 2026	Status	Realisasi
1	Penyusunan Alternatif Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis terkait dengan pengembangan ekosistem kegiatan usaha bulion	Terlaksana	Telah terlaksana Diskusi terkait Aspek Perpajakan ETF Emas atas undangan OJK pada 6 April 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang efektif dengan K/L terkait dengan pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bulion
2. Komunikasi yang efektif dan terfokus kepada stakeholder terkait dengan Ekosistem Kegiatan Usaha Bulion

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang perlu ditingkatkan Kembali antar K/L
2. Komunikasi yang efektif yang perlu ditingkatkan kembali antar stakeholder Ekosistem Kegiatan Usaha Bulion

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan kedepannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis
2. Memperkuat komunikasi yang efektif

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Indeks Kepuasan

Layanan

Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis

Latar Belakang

Sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas berfokus pada tugas dan fungsi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang mencakup:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis sebesar 3,77, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Indeks	3 dari 4	3,82	120%

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden. Dengan total responden sebesar 24 responden.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah

tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW II 2026	Status	Realisasi
1	Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Kepuasan Layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Semester I 2026	Terlaksana	Telah menyebarkan survey Kepuasan Layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Semester I 2026
2	Penguatan engagement dengan stakeholder (kehadiran aktif dalam forum koordinasi/undangan)	Terlaksana	Telah Melaksanakan forum koordinasi/rapat teknis kebijakan bersama para stakeholder terkait

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi yang efektif kepada stakeholder dalam rangka persiapan Survei Kepuasan Layanan unit kerja;
2. Penyusunan konsep pertanyaan Survei Kepuasan Layanan kepada stakeholder

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Dalam upaya mencapai target Triwulan II Tahun 2026, masih terdapat beberapa kendala diantaranya belum optimalnya tingkat partisipasi responden dalam pengisian Survei Kepuasan Layanan unit kerja. Dengan demikian diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan tingkat respons yang memadai sehingga hasil survei dapat mendukung pengukuran capaian kinerja secara optimal.

Berdasarkan kendala yang dihadapi serta capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 dimaksud, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan ke depannya melalui peningkatan partisipasi responden serta penguatan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka optimalisasi penyelesaian pengisian Survei Kepuasan Layanan unit kerja pada tahun 2026.

4

Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.

**Persentase
Pelaksanaan
Rencana Aksi
Reformasi Birokrasi
Asisten Deputi
Pengembangan
Badan Usaha Milik
Negara Bidang Jasa
Keuangan dan Usaha
Bisnis**

Latar Belakang

Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang baik merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh unit kerja dalam rangka mendorong dan memacu terselenggaranya program keasdepan dengan baik. Dalam pelaksanaannya program Keasdepan ditunjang dengan kegiatan administrasi tata kelola yang mana merupakan suatu proses kebiasaan, kebijakan, dan aturan yang mempengaruhi pengelolaan suatu unit kegiatan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung melalui manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan dan penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan, pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan internal yang efektif.

Tata Kelola asisten deputi yang baik merupakan *cascading* dari “*Terwujudnya Tata Kelola yang Baik*”. Dengan terwujudnya tata kelola di seluruh Asisten Deputi dalam satu Deputi diharapkan mampu mendorong penyelenggaraan kegiatan yang optimal yang kemudian dapat mendorong kinerja Deputi pada umumnya.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis sebesar 40% dengan target Triwulan II 2026 sebesar 40%, sehingga tercapai 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Persentase	40%	40%	100%

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha

Bisnis dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW II 2026	Status	Realisasi
1	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlasana	Telah melakukan Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan
2	Penyusunan Revisi Renja 2026	Terlaksana	Telah melakukan Penyusunan revisi Renja Tahun 2026
3	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI melalui aktivasi akun SRIKANDI seluruh pegawai serta pendistribusian disposisi

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi
2. Optimalisasi digitalisasi arsip di unit kerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya optimalisasi pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Penyusunan Manual IKU, Rencana Aksi (Renaksi), dan Laporan Kinerja Triwulanan masih dilaksanakan secara manual;

2. Aplikasi SRIKANDI masih mengalami kendala teknis yang menghambat pelaksanaan digitalisasi administrasi dan pengelolaan dokumen.

Berdasarkan kendala yang dihadapi serta capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan ke depannya yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Sekretariat Deputi dan Biro Perencanaan dalam rangka penyusunan Manual IKU, Rencana Aksi (Renaksi), dan Laporan Kinerja Triwulanan;
2. Meningkatkan pemanfaatan aplikasi SRIKANDI melalui pelaksanaan sosialisasi internal, disertai koordinasi yang berkelanjutan dengan tim *helpdesk* SRIKANDI terkait optimalisasi kinerja sistem.